

LAMPIRAN

- **Lampiran 1: Lokasi Penelitian**



Lampiran 1. Lokasi Penelitian

- **Lampiran 2: Pertemuan Dengan Pihak Desa**



Lampiran 2. Pertemuan Dengan Pihak Desa

- **Lampiran 3: Pengumpulan Data**



Lampiran 3. Pengumpulan Data

- **Lampiran 4: Contoh SPPT**

KANTOR WILAYAH : DJP - JAKARTA 1
 KANTOR PELAYANAN PBB : JAKARTA - CEMPAGA PUTIH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2005 PERKOTAAN

NO. SPPT(NOP) : XXXX.XXX.XXX.XXX.X
 NPWP : BELUM ADA

LETAH OBJEK PAJAK JL. XXXX XXXXX XXX RT : XXX RW : XXX RAWASARI CEMPAGA PUTIH JAKARTA PUSAT			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK XXXX XXXXX JL. XXXX XXXXX XXX RT : XXX RW : XXX RAWASARI JAKARTA PUSAT	
---	--	--	--	--

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI	972	B49	3.745.000	3.640.140.000
BANGUNAN	1.064	A02	968.000	1.029.952.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 4.670.092.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 4.658.092.000
 NJOP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 4.658.092.000 = 1.863.236.800
 Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x 1.863.236.800 = 9.316.184

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 9.316.184
 SEMBELAN JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS SERATUS DELAPAN
 PULUH EMPAT RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 29 AGU 2005
 TEMPAT PEMBAYARAN : BANK MANDIRI SEAHEN CLUB
 BUKOPIN

JAKARTA, 03 JAN 2005
 PJ - KEPALA KANTOR

SPPT DAN STTS PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK
 INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK
 NJOP DOLUWAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
 33105060203269RAA4A4704 NIP :

NAMA WP : XXXX XXXXX Letah Objek Pajak : Kecamatan CEMPAGA PUTIH Desa/Kel : RAWASARI No. SPPT (NOP) : XX.XX.XXX.XXX.XXX.XXX.X SPPT Tahun/Rp. : 2005 - 9.316.184	Diterima Igi : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang
---	--

Lampiran 4. Contoh SPPT

▪ **Lampiran 5: Contoh Laporan PBB**

DAFTAR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB/PT)
TAHUN 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN BUDIDAYA		KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN STATISTIKA		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN BUDIDAYA		KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN STATISTIKA	
KEMENTERIAN KEUANGAN		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN BUDIDAYA		KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN STATISTIKA		KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN BUDIDAYA		KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN STATISTIKA	
NO	NO SURAT	NAMA WP	ALAMAT WP	Rp.					
1	32.09.241.004.015.0001.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
2	32.09.241.004.015.0002.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
3	32.09.241.004.015.0003.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	24.935					
4	32.09.241.004.015.0004.0	EMAN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
5	32.09.241.004.015.0005.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
6	32.09.241.004.015.0006.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
7	32.09.241.004.015.0007.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
8	32.09.241.004.015.0008.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
9	32.09.241.004.015.0009.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
10	32.09.241.004.015.0010.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
11	32.09.241.004.015.0011.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
12	32.09.241.004.015.0012.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
13	32.09.241.004.015.0013.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
14	32.09.241.004.015.0014.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
15	32.09.241.004.015.0015.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
16	32.09.241.004.015.0016.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
17	32.09.241.004.015.0017.0	UPIN H	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
18	32.09.241.004.015.0018.0	YOYO SUHAIYO	DL BANTAR LANDEUH	12.500					
19	32.09.241.004.015.0019.0	EMAN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
20	32.09.241.004.015.0020.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
21	32.09.241.004.015.0021.0	EMAN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
22	32.09.241.004.015.0022.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
23	32.09.241.004.015.0023.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	17.015					
24	32.09.241.004.015.0024.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	13.004					
25	32.09.241.004.015.0025.0	ENGKING	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
26	32.09.241.004.015.0026.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
27	32.09.241.004.015.0027.0	AGUS	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
28	32.09.241.004.015.0028.0	O TARYONO	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
29	32.09.241.004.015.0029.0	O TARYONO	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
30	32.09.241.004.015.0030.0	DEDE HARMUDIN	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
31	32.09.241.004.015.0031.0	ING	DUSUN BANTAR LANDEUH	12.500					
32	32.09.241.004.015.0032.0	O TARYONO	DUSUN BANTAR LANDEUH	16.881					
33	32.09.241.004.015.0033.0	EMAN H	DSN BANTAR LANDEUH	17.841					
34	32.09.241.004.015.0034.0	UPIN H	DUSUN BANTAR LANDEUH	12.500					
35	32.09.241.004.015.0035.0	NANA	DUSUN BANTAR LANDEUH	12.500					
36	32.09.241.004.015.0036.0	YOYO SUHAIYO	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
37	32.09.241.004.015.0037.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
38	32.09.241.004.015.0038.0	MAMAH	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
39	32.09.241.004.015.0039.0	YOYO	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
40	32.09.241.004.015.0040.0	EMAN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
41	32.09.241.004.015.0041.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
42	32.09.241.004.015.0042.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	25.617					
43	32.09.241.004.015.0043.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	17.031					
44	32.09.241.004.015.0044.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
45	32.09.241.004.015.0045.0	AIAT ENTAT	DSN BANTAR LANDEUH	17.487					
46	32.09.241.004.015.0046.0	ACUNG ENTAT	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
47	32.09.241.004.015.0047.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
48	32.09.241.004.015.0048.0	AIM IBRAHIM	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
49	32.09.241.004.015.0049.0	URAD	DSN BANTAR LANDEUH	17.385					
50	32.09.241.004.015.0050.0	IBROHIM	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
51	32.09.241.004.015.0051.0	NANA CS	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
52	32.09.241.004.015.0052.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
53	32.09.241.004.015.0053.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
54	32.09.241.004.015.0054.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
55	32.09.241.004.015.0055.0	ENTANG	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					
56	32.09.241.004.015.0056.0	UPIN H	DSN BANTAR LANDEUH	12.500					

Lampiran 5. Contoh Laporan PBB

- **Lampiran 6: Data Wawancara Dengan Perangkat Desa**
 - a. **Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes)**

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1	Bagaimana prosedur monitoring Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Awiluar saat ini?	Proses monitoring masih dilakukan secara manual. Data dikumpulkan dari Kepala Dusun dalam bentuk catatan kertas, lalu direkap menggunakan Excel sederhana.	Sistem manual, belum ada integrasi.
2	Media atau alat apa yang digunakan dalam proses pencatatan dan pelaporan PBB?	Buku tulis, lembar catatan, dan file Excel sederhana.	Tidak ada aplikasi khusus.
3	Kendala apa saja yang sering muncul dalam proses pengelolaan dan pelaporan PBB?	Sulit memantau pembayaran secara real-time, rawan kehilangan data, rekap memakan waktu lama, dan sering terjadi kesalahan input.	Data tidak terstruktur dengan baik.
4	Apakah ada format khusus yang digunakan untuk rekapitulasi data PBB?	Ya, menggunakan format Excel sederhana berdasarkan dusun.	Format dibuat sendiri oleh Sekdes.
5	Bagaimana proses distribusi SPPT kepada wajib pajak?	SPPT diterima dari kecamatan, lalu dibagikan kepada Kepala Dusun untuk diteruskan ke warga.	Distribusi manual.

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
6	Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari pengumpulan data hingga pembuatan laporan PBB tahunan?	Bisa memakan waktu beberapa minggu karena harus menunggu laporan dari semua dusun.	Tergantung kelengkapan laporan dusun.
7	Apakah data PBB sudah terdigitalisasi atau masih dalam bentuk fisik/manual?	Sebagian besar masih fisik/manual, hanya sebagian data yang diketik di Excel.	Digitalisasi belum optimal.
8	Apa harapan atau kebutuhan desa terhadap sistem monitoring PBB yang lebih modern?	Sistem yang bisa memantau pembayaran secara real-time, terintegrasi antar dusun, dan dapat mencetak laporan otomatis.	Efisiensi & transparansi.
9	Siapa saja yang biasanya terlibat langsung dalam proses monitoring dan pelaporan PBB?	Sekdes, Kepala Dusun, dan petugas PBB di tingkat desa.	Peran utama di Sekdes & Kadus.
10	Bagaimana proses pelaporan PBB dari Kepala Dusun ke Sekdes saat ini?	Kepala Dusun menyerahkan catatan pembayaran ke Sekdes secara manual setiap akhir periode pelaporan.	Tidak ada sistem online.

Lampiran 6. Tabel Wawancara Sekretaris Desa

b. Wawancara dengan Kepala Dusun (Kadus)

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1	Bagaimana proses penerimaan pembayaran	Warga membayar langsung ke Kepala Dusun, kemudian	Pembayaran tunai.

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
	PBB dari warga di dusun Anda?	dicatat di buku penerimaan.	
2	Apakah pencatatan pembayaran dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat digital?	Manual di buku tulis, lalu kadang direkap di Excel.	Tidak ada aplikasi.
3	Kendala apa yang sering dihadapi dalam pengumpulan data pembayaran PBB?	Warga yang telat bayar, data pembayaran tidak langsung tersampaikan ke Sekdes, dan risiko catatan hilang.	Pengumpulan tidak real-time.
4	Seberapa sering laporan PBB disampaikan kepada Sekretaris Desa?	Umumnya setiap bulan atau menjelang akhir periode pelaporan.	Bergantung kecepatan warga membayar.
5	Apakah pernah terjadi data hilang atau tidak sinkron antara catatan Kadus dan Sekdes?	Pernah, terutama jika ada kesalahan pencatatan atau kertas hilang.	Perlu sistem terintegrasi.
6	Bagaimana Anda memastikan semua wajib pajak di dusun Anda menerima SPPT?	Dibagikan langsung ke rumah warga atau saat pertemuan RT.	Manual.
7	Apakah ada upaya pengarsipan data PBB di dusun masing-masing?	Ya, disimpan di arsip dusun tetapi masih berbentuk fisik.	Tidak ada backup digital.
8	Bagaimana cara Anda menginformasikan status pembayaran kepada warga?	Disampaikan langsung saat bertemu warga atau melalui pengumuman di pertemuan warga.	Tidak ada notifikasi otomatis.

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
9	Menurut Anda, fitur apa saja yang harus ada jika dibuat sistem monitoring PBB berbasis komputer?	Input data pembayaran, pengecekan status bayar, rekap otomatis, dan laporan cetak.	Harus mudah digunakan.
10	Bagaimana pendapat Anda jika sistem ini diintegrasikan dengan seluruh dusun secara real-time?	Sangat membantu dan mempermudah pelaporan ke desa.	Setuju, asalkan ada pelatihan.

Lampiran 7. Tabel Wawancara Kepala Dusun

c. Wawancara dengan Kepala Desa

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1	Bagaimana Anda memantau kinerja pengelolaan PBB di desa?	Melihat laporan dari Sekdes setiap periode pelaporan.	Data masih manual.
2	Data atau laporan apa yang paling dibutuhkan untuk pengambilan keputusan terkait PBB?	Rekap jumlah wajib pajak, jumlah yang sudah bayar, dan yang belum bayar per dusun.	Data akurat sangat penting.
3	Apakah laporan yang diterima saat ini sudah cukup akurat dan tepat waktu?	Cukup akurat, tapi sering terlambat.	Perlu percepatan pelaporan.
4	Kendala apa yang sering Anda hadapi saat mengevaluasi kinerja PBB?	Keterlambatan laporan dan tidak adanya data real-time.	Hambatan di level pengumpulan data.
5	Apakah pernah ada target atau standar capaian pembayaran PBB di desa?	Ya, target capaian 100% setiap tahun.	Sering tidak tercapai tepat waktu.

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
6	Bagaimana proses pelaporan PBB dari Sekdes kepada Anda?	Disampaikan dalam bentuk laporan cetak atau Excel sederhana.	Manual.
7	Menurut Anda, apakah sistem monitoring PBB berbasis komputer akan membantu kinerja desa?	Ya, akan mempercepat, mempermudah, dan membuat laporan lebih akurat.	Sangat dibutuhkan.
8	Fitur atau informasi apa yang paling penting bagi Kepala Desa dalam sistem tersebut?	Rekap pembayaran per dusun, status bayar per warga, dan capaian persentase.	Visualisasi data akan membantu.
9	Apakah ada rencana desa untuk mengembangkan sistem informasi pajak di masa depan?	Ada, jika ada dukungan anggaran dan pelatihan.	Perlu perencanaan matang.
10	Apa harapan Anda terhadap penerapan sistem monitoring PBB yang terintegrasi?	Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan capaian pembayaran PBB.	Harapan besar untuk realisasi.

Lampiran 8. Tabel Wawancara Kepala Desa